

**PERALIHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN KE
PEMERINTAH PROVINSI DITINJAU DARI
(UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH)**

Andrea Peatric Hatane

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
s120114215@student.ubaya.ac.id

Abstrak - Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari peralihan kewenangan di bidang pendidikan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari perubahan tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan di bidang pendidikan khususnya mengenai pengelolaan pendidikan sekolah menengah dan penerbitan izin untuk sekolah menengah dan sekolah luar biasa. Hal itu menyebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota harus tunduk dan taat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan itu, berlaku pula Pasal 50 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehubungan dengan itu, melalui pertimbangan hakim berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori*, pasal 407 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan menjadi sebuah jawaban atas tumpang tindih suatu peraturan. Sejalan dengan itu, maka seluruh Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan.

Kata Kunci: pemerintah daerah, kewenangan, peralihan kewenangan, pendidikan.

**TRANSITION OF AUTHORITY OF GOVERNMENT AFFAIRS IN
EDUCATION FROM CITY / DISTRICT GOVERNMENT TO PROVINCIAL
GOVERNMENT REVIEWED FROM
(LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENTS)**

Andrea Peatric Hatane

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
s120114215@student.ubaya.ac.id

***Abstract** - This thesis aims to analyze the legal consequences of authority transfer in the field of education according to Law 23 of 2014 concerning Regional Government. The study shows that as a result of these changes, the Regional / City Government has no longer had an authority in the educational system especially in terms of secondary school educational management and the issuance of secondary and special school permits. Hence, Regional / City Governments must comply with Article 15 Law 23 of 2014 concerning Regional Government. Other than that, there is an Article 50 Paragraph (5) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. However, through judges' consideration based on the *lex posteriori derogat legi priori* principle, article 407 of Law 23 of 2014 concerning Regional Government will be an answer of the overlap. Along with that, all the Laws and Regulations under constitution relates to education must conform to Law No. 23 of 2014.*

Keyword: local government, authority, transfer of authority, education.